

PENGARUH TENAGA KERJA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Harnita, Sri Astuty, Andi Samsir.

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Makassar, 2020
Nitaharnita07@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyze the effect of labor and government expenditure on economic growth in the province of south Sulawesi, the research uses secondary data obtained from the statistical body of the province of south Sulawesi in 2004 to 2018. The data analysis technique used in this study is linear regression multiple, classic assumption test, t test, f and coefficient of determination test (R^2). The results of this study indicate that government expenditure variables significantly influence economic growth in the province of south Sulawesi with a coefficient value of 1,585 and a significance of a $0,022 < 0,05$ while the labor variable does not have a significant effect on economic growth in the province of south Sulawesi with a coefficient value of -4,371 and significance of $0,253 > 0,05$*

Keywords: labor, government expenditure, economic growth

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2004 sampai tahun 2018. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai koefisien sebesar 1,585 dan signifikan sebesar $0,022 < 0,05$ sedangkan variabel tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien sebesar -4,317 dan signifikan sebesar $0,253 > 0,05$.

Kata Kunci: Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada

suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh

mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat (Hellen, 2017).

Pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat, sehingga pendapatan masyarakat ekonomi yang terus menurun dapat menggambarkan pembangunan ekonomi tidak berjalan atau mengalami kemunduran.

Sulawesi selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan didukung pula oleh sumber daya manusianya terus melaksanakan pembangunan secara berencana dan bertahap, tanpa mengabaikan usaha pemerataan dan kestabilan. Pembangunan ekonomi suatu negara dapat dikatakan meningkat dengan hanya melihat pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya meningkat maka dapat dikatakan pembangunan ekonomi meningkat.

Salah satu yang menjadi indikator yang dapat berpengaruh terhadap

akan bertambah, dengan demikian tingkat kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat. Agar pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang maka perlu diketahui faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan faktor apa yang perlu dihindari agar pertumbuhan ekonomi tidak berjalan ditempat atau mengalami kemunduran. pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi yaitu tenaga kerja. Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi dan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya akan lebih besar juga.

Selain tenaga kerja pengeluaran pemerintah juga termasuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah merupakan salah satu ukuran yang mempengaruhi perekonomian dan bentuk stimulus yang dilakukan pemerintah pada tahap awal perkembangan. Hal ini terkait bahwa pengeluaran pemerintah

mempunyai peranan sebagai instrumen fiskal melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pertumbuhan suatu perekonomian tidak bisa lepas dari peran pemerintah. Menurut Todaro (2000) pemerintah harus diakui dan dipercaya untuk memikul peranan lebih besar dan lebih menentukan di dalam upaya pengelolaan perekonomian nasional/daerah. Pengeluaran pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proposional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pengeluaran pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pertumbuhan ekonomi

a. Teori pertumbuhan ekonomi klasik

Menurut adam smith (Lincoln Arsyad, 2016) proses pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan menjadi dua aspek utama, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Dalam aspek pertumbuhan output total terdapat tiga unsur pokok dari sistem produksi suatu negara yaitu:

1) Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumberdaya alam yang

tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan. Maksudnya, jika sumberdaya alam belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada akan terus memacu pertumbuhan output. Namun, pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumberdaya alam telah digunakan secara optimal.

- 2) Sumberdaya manusia direpresentasikan oleh jumlah penduduk. Sumberdaya manusia memegang peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat.
- 3) Akumulasi modal yang dimiliki, dimana stok modal memegang peranan paling penting dalam pembangunan ekonomi. Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output.

b. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik

Teori Solow dan Swan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertumbuhan penyediaan faktor-faktor produksi yang berupa penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal. Model pertumbuhan Solow ini yang sering disebut sebagai model pertumbuhan neoklasik

(mankiw, 2006). Model dasar dalam pertumbuhan ini adalah:

$$Y = F(K,L)$$

Dimana :

Y = Output,

K = Kapital/modal fisik.

L = Tenaga kerja.

Menurut pertumbuhan ini, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor, yaitu kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi) serta penyempurnaan teknologi.

Teori pertumbuhan baru Menurut Romer (Tadaro, 2006) menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem produksi, bukan berasal dari luar sistem. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari sekedar bagian dari pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik dan modal manusia. Dalam teori pertumbuhan endogen, peran investasi dalam modal fisik dan modal manusia turut menentukan pertumbuhan ekonomi jangka

panjang (mankiw, 2006). Model dasar dalam pertumbuhan ini adalah:

$$Y = A f(K,H,L)$$

Dimana:

Y = output,

A = teknologi,

K = modal,

L = tenaga kerja,

H = sumber daya manusia.

2. Tenaga Kerja

Teori Lewis (Tadaro, 2000) yang mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain. Ada dua struktur di dalam perekonomian negara berkembang, yaitu sektor kapitalis modern dan sektor subsisten terbelakang.

Menurut Lewis sektor subsisten terbelakang tidak hanya terdiri dari sektor pertanian, tetapi juga sektor informal seperti pedagang kaki lima dan pengecer koran. Sektor subsisten terbelakang mempunyai kelebihan penawaran pekerja dan tingkat upah relatif murah daripada sektor kapitalis modern. Lebih murah biaya upah pekerja asal pedesaan akan dapat menjadi pendorong bagi pengusaha di perkotaan untuk memanfaatkan pekerjaan tersebut dalam pengembangan industri modern perkotaan.

Selama berlangsungnya industrialisasi, kelebihan penawaran pekerja di sektor subsisten terbelakang akan diserap.

Teori Marx menyatakan bahwa nilai tenaga kerja harus tergantung pada jumlah jam kerja yang dibutuhkan masyarakat, rata-rata, untuk memberi makanan, pakaian, dan tempat tinggal pekerja sehingga ia memiliki kapasitas untuk bekerja. Dengan kata lain, upah jangka panjang yang pekerja menerima akan tergantung pada jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan orang yang cocok untuk pekerjaan. Misalkan lima jam kerja yang diperlukan untuk memberi makan, pakaian, dan melindungi pekerja setiap hari sehingga pekerja cocok untuk pekerjaan keesokan harinya. Jika satu jam kerja setara satu dollar, upah yang Teori benar akan menjadi lima dollar per hari.

Teori Harrod-Domar menyatakan investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Peran modal dalam model pertumbuhan sangat penting, akan tetapi kapasitas produksi hanya dapat meningkat bila sumber daya lain (modal fisik) membesar. Disamping itu dalam model pertumbuhan, jumlah penduduk yang besar tidak mengurangi pendapatan per kapita asalkan modal fisiknya meningkat. Model yang sama juga dikemukakan oleh model

solow dimana dalam model ini dipakai suatu fungsi produksi Cobb-Douglas. Angkatan kerja di asumsikan tumbuh secara geometris dan full employment selalu tercapai. Tetapi dalam model ini pekerja sudah diperluaskan secara jelas sebagai salah satu faktor produksi, dan bukan sekedar pembagi (untuk memperoleh output pekerja). Dalam model ini juga dilihat substitusi antara modal fisik dan pekerja.

Teori Keynes menyatakan bahwa kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan (equilibrium). Dalam posisi keseimbangan semua sumber daya, termasuk tenaga kerja, akan digunakan secara penuh (full-employed). Dengan demikian di bawah sistem yang didasarkan pada mekanisme pasar tidak ada pengangguran. Kalau tidak ada yang bekerja, daripada tidak memperoleh pendapatan sama sekali, maka mereka bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah, kesediaan untuk bekerja dengan tingkat upah lebih rendah ini akan menarik perusahaan untuk mempekerjakan mereka lebih banyak.

Payaman J. Simanjuntak (1998) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan

melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Perluasan kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja yang penuh, serta memberikan imbalan dan penghargaan yang layak, mempunyai peranan yang menentukan bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial jangka panjang. Tenaga kerja bukan hanya penting sebagai subjek yang melakukan segala kegiatan pembangunan. Akan tetapi juga penting karena pendapatan yang mereka peroleh dari pekerjaan akan memberikan daya beli kepada masyarakat dan seterusnya menimbulkan permintaan efektif mengenai barang dan jasa yang dihasilkan dalam pembangunan. Atau dengan kata lain, pekerjaan yang memberikan imbalan pendapatan yang layak akan mampu menimbulkan dan membutuhkan pasar dalam negeri.

3. Pengeluaran Pemerintah

Teori Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. (1) Tahap awal, perkembangan ekonomi persentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (2) Tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar. (3) Tahap lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat (Mangkoesobroto, 2008).

Teori Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa pemerintah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Peacock dan Wiseman menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah. Dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah semakin besar. Begitu juga dengan pengeluaran pemerintah yang menjadi semakin besar (Mangkoesobroto, 2008).

Dumairy (1996) menyatakan bahwa pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu

bukan saja untuk menjalankan roda pemerintah sehari-hari, akan tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian. Bukan berarti pemerintah turut berbisnis, melainkan dalam arti pemerintah harus kegiatan ekonomi secara umum. Pemerintah yang baik harus senantiasa menggerakkan dan merangsang berusaha menghindari dan memperbaiki kegagalan pasar demi tercapainya efisiensi. Pemerintah juga harus memperjuangkan pemerataan melalui program perpajakan dan redistribusi pendapatan untuk kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Pemerintah harus menggunakan perangkat perpajakan, pembelanjaan dan peraturan moneter untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi laju inflasi dan pengangguran serta memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Hipotesis

Hipotesis adalah diduga bahwa tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi selatan.

METODE

Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang

bersifat kuantitatif yang meliputi data (*time series*) mengenai data tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2004-2018. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari instansi atau lembaga yang bersangkutan, seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

Populasi dalam penelitian ini yaitu keseluruhan data mengenai tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi selatan. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. Sampel dalam penelitian ini yaitu tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi selatan periode 2004-2018.

Metode Analisis Data

Metode analisis kuantitatif menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen atau pengaruh antara tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, persamaannya sebagai berikut :

$$PE = \alpha + \beta_1 TK + \beta_2 PP + e \dots \dots \dots (1.1)$$

Keterangan :

PE = Pertumbuhan Ekonomi

A = Intercept/ konstanta

- $\beta_1 \beta_2$ = Koefisien regresi variabel bebas
- TK = Tenaga Kerja
- PP = Pengeluaran Pemerintah
- e = *Error term*

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana faktor-faktor pengganggu yang satu dengan yang lain saling berhubungan serta untuk menguji suatu model apabila kesalahan pengganggu pada pada suatu periode tertentu berkorelasi dengan kesalahan pengganggu pada periode lainnya, pengujian terhadap gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji *Durbin-Watson* (DW). Jika pengujian autokorelasi diabaikan, maka akan berdampak terhadap pengujian hipotesis dan proses peramalan.

Besarnya nilai statistik DW dapat diperoleh dengan rumus (Nachrowi dan Hardius, 2002).

$$DW = \frac{\sum(e_t - e_{t-1})^2}{\sum e_t^2} \dots\dots\dots(1.2)$$

Keterangan :

- DW : Statistik Durbin-Watson
- e : Nilai Residual
- e_{t-1} : Nilai Residual Satu Periode Sebelumnya

Pengambilan keputusannya:

- 1) Jika nilai DW terletak antara batas atau upper bound (du) dan (4-du), maka

koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi positif.

- 2) Jika nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah atau lower bound (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar dari pada nol, berarti ada autokorelasi positif.
- 3) Jika DW lebih besar dari pada (4-dl), maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol, berarti ada autokorelasi positif.
- 4) Jika nilai DW lebih besar dari pada (4-dl), maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari pada nol, berarti autokorelasi negatif.
- 5) Jika nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji model regresi terjadi hubungan yang sempurna antara variabel-variabel bebas yang menjelaskan dalam semua model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen/bebas. Adapun dasar pengambilan keputusan untuk multikolinearitas yaitu:

- 1) R square rendah $< 0,8$ (tidak terjadi multikolinearitas)
- 2) X_1 X_2 dan $X_3 < 0,85$ (terjadi multikolinearitas)
- 3) VIF < 10 (tidak terjadi multikolinearitas)

c. Uji heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual antar pengamatan tetap maka kondisi ini disebut homokedastisitas. Akan tetapi jika berbeda maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang bersifat homokedastisitas. Uji yang digunakan untuk menilai adanya gejala heterokedastisitas yaitu uji glejser dengan cara meregresikan variabel independen terhadap nilai absolut. Adapun dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan uji glejser yaitu:

- 1) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi.
- 2) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi.

Uji Statistik

a. Uji f (Uji simultan)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima (tidak signifikan). Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak (signifikan). Artinya variabel independen bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat.

Dalam pengujian hipotesis ini, dapat juga dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$F_{hitung} = \frac{R^2/(K-1)}{1-R^2/(n-K)} \dots \dots \dots (1.3)$$

Keterangan:

- n = Jumlah Sampel.
- k = Jumlah Variabel.
- R^2 = Koefisien Determinasi.

b. Uji t (Uji parsial)

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial (sendiri) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) serta mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak signifikan. Dimana jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ H_1 diterima (signifikan) dan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ H_0 diterima (tidak signifikan). Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak.

Dalam pengujian hipotesis ini, dapat juga dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{\beta_i}{S\beta_i} \dots \dots \dots (1.4)$$

Keterangan :

β : Koefisien regresi ke -i.

$S\beta_i$: Kesalahan standar koefisien regresi ke -i.

Uji Koefisien Determinasi (*R-squared*)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar persentase variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebasnya (Gujarati, 2007). Di mana apabila nilai R^2 mendekati 1, maka terbukti bahwa ada hubungan yang kuat dan erat antara variabel terikat dan variabel bebas dan penggunaan model tersebut dibenarkan. Koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel tidak bebas yang dapat dinyatakan dalam persentase, namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi terjadi bisa terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan corrected atau adjusted R^2 yang dirumuskan:

$$Adj R^2 = R^2 - \frac{P(1-R^2)}{N-P-1} \dots \dots \dots (1.5)$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien Determinasi.

P = Jumlah Variabel Bebas.

N = Jumlah Sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.1 Hasil Estimasi Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

No	Variabel Bebas	TH	β	Thitung	Pertumbuhan Ekonomi		
					Sig.	VIF	Uji Glejser
1	Tenaga Kerja	-	-4,317	-1,201	0,253	5,321	0,697
2	Pengeluaran Pemerintah	+	1,585	2,618	0,022	5,321	0,767
<i>prob. (F-statistik)</i>							0,010
<i>Adjusted R2</i>							0,461
<i>Costanta</i>							48,689
<i>Fhitung</i>							6,991
<i>Ftabel</i>							3,89
<i>Ttabel</i>							1,782
<i>Durbin-watson : 2.384, dl : 0,945, du: 1,543, 4-dU : 2,457, 4-dL : 3,025</i>							
<i>N</i>							15

Keterangan:

* : Signifikan pada tingkat kesalahan 5% (0,05)

T.H : Tanda harapan

VIF : *Variance Inflation Factor*

Berdasarkan hasil tabel 1.1 maka dapat dimaksudkan dalam persamaan regresi linear berganda berikut ini :

$$PE = \beta_0 - \beta_1 \text{LnTK} + \beta_2 \text{LnPP} + e \dots\dots\dots (1.6)$$

$$PE = 48,689 - 0,253\text{TK} + 0,022\text{PP} + e \dots\dots\dots (1.7)$$

Keterangan :

Ln : Logaritma Natural

PE : Pertumbuhan Ekonomi

TK : Tenaga Kerja

PP : Pengeluaran Pemerintah

Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2018.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,253 > 0,05 dan nilai t-hitung (-1,201) < t-tabel (1,782). Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan nilai

koefisien regresi sebesar $-4,317$ menunjukkan bahwa setiap penambahan tenaga kerja maka akan mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar $4,317$. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai rata-rata angkatan kerja setiap tahunnya sebesar $3.264.153$ jiwa yang cukup besar pada provinsi Sulawesi selatan.

Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis bahwa apabila tenaga kerja meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Dan tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Samuelson dan Nordhaus menyatakan bahwa input tenaga kerja terdiri dari kuantitas tenaga kerja dan keterampilan angkatan kerja. Tenaga kerja yang melimpah harus diikuti dengan kualitas yang dimilikinya. Kualitas input tenaga kerja meliputi keterampilan, pengetahuan, dan disiplin angkatan kerja. Kemajuan teknologi yang semakin cepat akan efektif digunakan oleh tenaga kerja yang terampil dan terlatih. Perbaikan-perbaikan dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta disiplin tenaga kerja akan menambah produktivitas tenaga kerja. Sehingga tenaga kerja terdidik dan memiliki disiplin yang tinggi penting dimiliki suatu negara atau daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Payaman J. Simanjuntak (1998) menyatakan bahwa perluasan kesempatan

kerja dan penggunaan tenaga kerja yang penuh, serta memberikan imbalan dan penghargaan yang layak, mempunyai peranan yang menentukan bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial jangka panjang. Tenaga kerja bukan hanya penting sebagai subjek yang melakukan segala kegiatan pembangunan. Akan tetapi juga penting karena pendapatan yang mereka peroleh dari pekerjaan akan memberikan daya beli kepada masyarakat dan seterusnya menimbulkan permintaan efektif mengenai barang dan jasa yang dihasilkan dalam pembangunan. Atau dengan kata lain, pekerjaan yang memberikan imbalan pendapatan yang layak akan mampu menimbulkan dan membutuhkan pasar dalam negeri.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fitriani (2017) dengan judul “Pengaruh tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi daerah istimewa Yogyakarta” dengan hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti (2017) dengan judul “pengaruh tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah di kota Makassar” dengan hasil

penelitian ini menyatakan bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Dika Candra Puspitaningrum (2017) dengan judul “Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan dan Korupsi Terhadap PDRB Provinsi Indonesia” dengan hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2018.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,022 < 0,05$ dan nilai t-hitung ($2,618$) $>$ t-tabel ($1,782$). Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan nilai koefisien regresi sebesar 1,585 menunjukkan bahwa setiap penambahan pengeluaran pemerintah maka akan menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 1,585. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai rata-rata pengeluaran

pemerintah setiap tahunnya sebesar Rp 2.602.194 yang cukup besar pada provinsi Sulawesi selatan.

Secara teoritis hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya.

Teori Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. (1) Tahap awal, perkembangan ekonomi persentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (2) Tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar. (3) Tahap lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program

pelayanan kesehatan masyarakat (Mangkoesoebroto, 2008).

Teori Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa pemerintah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Peacock dan Wiseman menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah. Dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah semakin besar. Begitu juga dengan pengeluaran pemerintah yang menjadi semakin besar (Mangkoesoebroto, 2008).

Hasil ini sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa jika pengeluaran pemerintah meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Hal ini memperkuat bahwa pengeluaran pemerintah memberikan kontribusi yang menyakinkan terhadap kinerja perekonomian daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tesa Gustin (2019) melakukan penelitian dengan judul “Analisi Pengaruh

Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatra Barat” dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fitriani (2017) dengan judul “Pengaruh Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dara Ayu Wulansari, Dkk (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Inflasi dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan penelitian yang dilakukan oleh Devi Novita Sari, Dkk (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di

Kabupaten Lampung Tengah” dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi selatan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka berikut ini saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat mengalokasikan dan mengelola anggaran pengeluaran pemerintah secara proposional sehingga mampu memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih memberi informasi masalah dan pemahaman terkait perekonomian serta lebih mengutamakan variabel yang

diduga signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Fitriani, N. (2017). Pengaruh Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan dan Rkonomi*, Vol 1 No 7.
- Gujarati, D. (2007). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Gustin, T. (2019). *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2017*. Padang: Universitas Andalas.
- Hellen, Minarti, S., & Fitriadi. (2017). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja serta Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kesempatan Kerja. *Inovasi*, Vol 13 No 1.
- Konyogian, C. L., & Kindangen, P. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado. *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Keuangan*, Vol 19 No 4.
- Maisaroh, M., & Risyanto, H. (2018). Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja

- terhadap PDRB Provinsi Banten Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 1 No 2.
- Mangkoesobroto, G. (2008). *Ekonomi Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPF.
- Mankiw, N. G. (2006). *Makroekonomi Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Nachrowi, N. D., & Usman, H. (2002). *Penggunaan Teknik Ekonometrika*. Jakarta: RajawaliPers.
- Ningsih, D., & Sari, S. I. (2013). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam Tahun 2012-2016. *Jurnal Akuntansi*, Vol 3 No 1.
- Puspita, D. C. (2017). Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan dan Korupsi Terhadap Pertumbuhan PDRB Provinsi Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, Vol 5 No 1.
- , M., & Haeraty. (2015). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar Tahun 2004-2013. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol 11 No 1.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2004). *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta: Media Global Edukasi.
- Sari, D. N. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol 10 No 1.
- Simanjuntak, P. (1998). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Statistik, B. P. (2015). *Sulawesi Selatan dalam Angka Tahun 2015*. Makassar: Badan Pusat Statistik.
- Statistik, B. P. (2016). *Sulawesi Selatan dalam Angka Tahun 2016*. Makassar: Badan Pusat Statistik.
- Statistik, B. P. (2017). *Sulawesi Selatan dalam Angka Tahun 2017*. Makassar: Badan Pusat Statistik.
- Statistik, B. P. (2018). *Sulawesi Selatan dalam Angka Tahun 2018*. Makassar: Badan Pusat Statistik.
- Statistik, B. P. (2019). *Sulawesi Selatan dalam Angka Tahun 2019*. Makassar: Badan Pusat Statistik.
- Todaro, M. P. (2000). *Ekonomi Pembangunan Edisi Ketiga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kelima*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan Jilid Satu*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid Satu*. Jakarta: Erlangga.
- Wulansari, D. A. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Inflasi dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Sumber daya dan Lingkungan*, Vol 5 No 2.